

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134
- Agustina Selly, Dewi Rahma Kemala, Rio Mohammad Bagas. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*. Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial Vol. 5 No.2. 2021. Purwokerto : hal 242
- Anggriana, T.M & Dewi, N. “Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis”, *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi* 7 No. 1 (2016), hlm 31.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*, (Jakarta Sinar: Grafika, 2018), hlm. 13–31.
- Bagas Ade Satria. 2020. Efektivitas Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. *Jurnal Kajian*, Vol 29 No 1.
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995, h. 8
- Berten, K, 2011, *Etika*, Jakarta: Gramedia, hlm 98.
- Betha Dwidinanti Zefianningsih, “Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi”. *Prosiding Ks: Riset & Pkm* 3, Nomor 1 (2016), hlm: 1 – 154.
- BPS, “*Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*”, melalui <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html> diakses pada 15 Januari 2024, 14.09.
- Chandra Rahmadani, Sirajuddin, Miinudin. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah. *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*. (2024) : 89
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Dia Meirina Suri. *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU*. PUBLIKA, Vol 3, No.1 2017. Hal. 89-101.
- Dianah Rofifah, '*Implementasi Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga Iqro*', Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2020, 12–26.
- Ermaya Suradinata. 2013. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Ermaya Suradinata. 2013. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Fatmawati. *Fikih Siyasa*. Pusaka Almaida. Makassar. 2023 : hal. 2
- Friedman, Lawrence, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Penerbit P.T Tata Nusa, hlm 76.
- Friedman, Lawrence, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Penerbit P.T Tata Nusa, hlm 76.
- Hasil wawancara dengan Ibu Gandhes selaku staff Bagian Penyusunan Pemograman pada tanggal 24 September 2024, pukul 09.10 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Hanaris Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB
- Hasil wawancara dengan Bapak Hanaris Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 09.20 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Hanaris Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 09.25 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Hanaris Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 09.20 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Hanaris Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 09.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Najib dan Ibu Rosa selaku Masyarakat pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Najib dan Ibu Rosa selaku Masyarakat pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 13.10 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Rizky selaku staf Bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 25 September 2024, pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Rizky selaku staf Bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 25 September 2024, pukul 09.20 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Yoga selaku Masyarakat pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Yoga selaku Masyarakat pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 10.05 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Yoga selaku Masyarakat pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 10.10 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Gandhes selaku staff Bagian Penyusunan Pemograman pada tanggal 24 September 2024, pukul 09.00 WIB.

<https://kemenag.go.id/islam/khutbah-jum-at-menjaga-kerukunan-dalam-bermasyarakat-7pjY5> diakses pada 29 oktober 2024, pukul 12.17

<https://www.blitarkab.go.id/kondisi-umum-wilayah-kabupaten-blitar/> diakses tanggal 12 Oktober 2024, pukul 11.20 WIB.

Ida Bagus Gde Pujaastwa, '*Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*', 2016, 1–11.

Irwansyah, Setiawan Zaenal. *Prinsip-prinsip Fikih Siyasah*. Jurnal Cerdas Hukum. Volume 2. Nomor 1. November. (2023) : 70

Jocabus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*, hal 11 KBBI. *Pengertian Implementasi*. diakses di <https://kbbi.web.id/implementasi> pada 20 Januari pukul 19.20

Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Bina Cipta.

Labolo, Muhadam. 2016. *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Literatur IPDN

Lisa Harrison, *Metodelogi Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana, 2016)., hlm. 92

M Harahap, '*Hukum Acara Perdata*', (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal 56M. Yahya Harahap', 2013, 56.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 56

- Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda*, Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, Op Cit. H. 18
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2011), hlm. 24.
- Mantiri, J Siwi. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow) *Jurnal Kajian*, Vol 5 No 1.
- Mariam Darus Badruzaman, *et. al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 83
- Meleong dan Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 330
- Monavia Ayu Rizaty, "8 Provinsi dengan Desa/Kelurahan yang Memiliki Lokasi Gelandangan Terbanyak Nasional (2021)", melalui Jawa Timur Punya Lokasi Gelandangan Terbanyak Nasional (katadata.co.id), diakses pada 29 Januari 2024 pukul 12.13
- Muhammad Rifad Syarif Putra. *Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda di Kab. Pinrang* (Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014)
- Nanda R Gumelar. 2018. *Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman (Studi di Desa Selat Kecamatan Narmada Kota Sleman)*. Universitas Islam Indonesia
- Nurridha Rizkika Indah Sari Hatta. 2020. Efektivitas Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo. *Jurnal Kajian*, Vol 29 No 1.
- Nuzilah Nur Madhani, (2020). "Peranan Masyarakat Dalam Satuan Perlindungan Masyarakat Guna Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah". Skripsi (Ilmu Hukum: Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
- Oktaviani, J, 'Tinjauan Pustaka: Pengertian Implementasi', Sereal Untuk, 51.1. 2018, hlm 10.
- Pasal (13) Peraturan Bupati Blitar Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Blitar No 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Peraturan bupati nomor 101 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

Peraturan Bupati nomor 117 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

*PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG POLISI PAMONG PRAJA*

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm.133

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohamad Radjab*, (Jakarta: Bhratara, 1996), hal .35-41

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Penerbit Refika Aditama, hlm 25

Sosial Held, Virginia, 1984 *Etika Moral Pembetulan Tindakan*, Jakarta: Erlangga, hlm 34

St. Fatmawati L. et, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 1. (2021), hlm 155.

- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126
- Sutar, *Implementasi Perda No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Di Kota Pekanbaru*, Skripsi, 2010
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), hlm. 223
- Tumadi Nurul Hidayah. Kadri Wahijul. *Siyasah Syarriyah dan Fiqih Siyasah*. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. Volume 5, Edisi II (Desember 2022), Kabupaten Tanjung Jabung Barat : hal.57
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
- W. Damayanti, F. ., and M. Adnan, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015", *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 6, no. 03, hlm. 161-170.
- Winata Japatara, (2020). *Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Kabupaten Tulungagung Terkait Pelarangan Merusak Pohon, Taman, dan Bunga (Studi Kasus Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi (Ilmu Hukum: Universitas Brawijaya)
- Winda Wahyu Pratiwi, (2023). *Peran Dinas Sosial Pemberdaya Masyarakat dan Desa Dalam Penanganan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan Untuk Mengembalikan Fungsi Sosial Dalam Rangka Mewujudkan Ktertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Wonosobo*. Skripsi (Ilmu Hukum: Universitas Muhammadiyah Magelang)